

DAMPAK SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT TERHADAP AKTIVITAS PERTAMBANGAN BATU MARMER DI KELURAHAN OI FO'O KOTA BIMA

Lubis Hermanto
Firdaus

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo Bima

ABSTRACT. The establishment of industrial estates is followed by the increasing number of mining areas as one of the supporters of economic growth and development of a region, Indonesia has enormous potential for mining growth, this is because the territory of Indonesia has very abundant Natural Resources (SDA). Mining activities are mostly carried out in forest areas which are considered to have the potential of excavation to be sought, one of which is marble. Mining activities also exist in Bima City, precisely in the Kadole neighborhood of Oi FO'O Village, mining in the Kadole neighborhood is more on marble quarrying. The presence of mining activities in the Kadole environment, Oi FO'O Village, triggered the birth of many problems such as environmental problems and community welfare. The research method uses descriptive qualitative research with a phenomenological approach with research data collection techniques including: observation, interviews and documentation studies. Then the data analysis technique uses data reduction, data display and conclusion making (verification). The results showed that the impact of marble mining activities in the Oi FO'O neighborhood of Bima City on changes in environmental ecosystems, among others, in the form of the remains of stones seen on the hill or called tailings.

Keywords: Mining Activity, Social and Economic

ABSTRAK. Berdirinya kawasan industri diikuti dengan semakin banyaknya kawasan pertambangan sebagai salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu wilayah, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar akan pertumbuhan pertambangan, hal dikarenakan wilayah Indonesia yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat melimpah. Kegiatan pertambangan banyak dilakukan pada kawasan hutan yang dianggap memiliki potensi galian yang ingin dicari, salah satunya adalah batu marmer. Aktifitas pertambangan juga ada di Kota Bima tepatnya di lingkungan Kadole Kelurahan Oi FO'O, pertambangan di lingkungan Kadole lebih pada penggalian batu marmer. Kehadiran aktifitas pertambangan di lingkungan Kadole Kelurahan Oi FO'O, memicu lahirnya banyak permasalahan seperti permasalahan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dengan teknik pengumpulan data penelitian antara lain: observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Kemudian teknik analisa data dengan menggunakan reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan (*verifikasi*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dampak yang ditimbulkan dari aktifitas pertambangan batu marmer di lingkungan Oi FO'O Kota Bima terhadap perubahan *ekosistem* lingkungan antara lain berupa adanya sisa-sisa batu yang terlihat di atas bukit atau disebut dengan ampas buangan (*tailing*).

Kata Kunci: Aktifitas Pertambangan, Sosial dan Ekonomi

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun peningkatan ini tidak diikuti dengan perluasan jumlah wilayah yang tersedia di muka bumi. penduduk Indonesia sebagai masyarakat agraris banyak yang menggantungkan hidupnya pada lingkungan alamnya. Dewasa ini Pertumbuhan industri di Indonesia menjadi salah satu usaha bagi Negara agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk itu Negara berusaha untuk memanfaatkan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan bersama.

Dituliskan dalam pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tidak bisa dipungkiri bahwa kekayaan alam yang dimiliki oleh Negara Indonesia menjadi peluang besar bagi para pemangku kepentingan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Berdirinya kawasan industri diikuti dengan semakin banyaknya kawasan pertambangan sebagai salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Pada Undang-Undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nomor 32 tahun 2009 menyebutkan bahwa instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, Pemerintah Daerah atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pertambangan adalah salah satu aktivitas yang memanfaatkan sumberdaya alam. Pemanfaatan sumberdaya alam ini dapat dilakukan dengan pencairan, penggalan atau bahkan meledakkan gunung ataupun bebatuan guna memperoleh hasil tambang yang diharapkan. Kegiatan pertambangan banyak dilakukan pada kawasan hutan yang dianggap memiliki potensi galian yang ingin dicari, bahkan sejumlah kawasan pertambangan telah mengubah fungsi hutan menjadi kawasan yang

membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Meskipun tidak dipungkiri bahwa terdapat upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup oleh Pemerintah dan pemilik usaha tambang, namun itu semua tidaklah seimbang. Pembabatan hutan primer, kawasan hutan yang dilindungi hingga kawasan hutan yang berisi peninggalan sejarah purbakala menjadi kawasan tambang yang dimanfaatkan, terbukti dengan besarnya laju deforestasi hutan mencapai 610.375,92 Ha per tahun pada tahun 2011. Desakan kebutuhan menjadi faktor utama untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia. Namun dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia itu tidak terjadi dalam waktu yang lama, degradasi lahan menyebabkan permasalahan lingkungan timbul bahkan mengancam keberlangsungan makhluk hidup yang lain.

Pemikiran mengenai pertumbuhan ekonomi akan selalu berseberangan dengan pemikiran mengenai pelestarian. Dampak pertumbuhan ekonomi terutama pada aktivitas pertambangan menyebabkan sejumlah wilayah di Indonesia memiliki peninggalan galian yang tidak dapat dikembalikan lagi ke bentuk semula. Para pemegang kepentingan memiliki kuasa untuk memberikan izin pembukaan lahan hingga terjadi tumpang tindih aturan antara UU No. 11 Tahun 1967 mengenai Ketentuan Pokok Pertambangan dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Adanya aktivitas lobi dengan Departemen Pemerintahan tersebut serta campur tangan dari investor yang akan membuka kawasan tambang, menyebabkan terbentuknya sinkronisasi penerapan peraturan dari kedua Undang-Undang yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran sumber daya alam.

Undang-Undang yang bersifat sentralistik dan pembagian wilayah akibat Otonomi Daerah menyebabkan kegiatan pertambangan dipegang secara penuh oleh Pemerintah Pusat untuk aktivitas pertambangan golongan A dan B, sedangkan Pemerintah Daerah hanya

memegang perizinan untuk aktivitas tambang bahan galian C. Akibat pembagian ini, Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan untuk melarang aktivitas pertambangan terbuka yang secara nyata dapat merusak lingkungan bahkan meninggalkan kubangan yang sulit untuk dikembalikan seperti keadaan semula.

Permasalahan yang terjadi bukan hanya pada pemegang kuasa, pemberian izin dan pemangku kepentingan, namun permasalahan yang semakin mencuat adalah dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan.

Ketidakseimbangan yang terjadi tidak hanya pada segi ekologi, melainkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat akan dipengaruhi. Peluang kerja, pendapatan, migrasi hingga peluang usaha dalam penelitian yang dilakukan Dharma (2011) menjadi dampak dari aktivitas pertambangan batu marmer. Namun dampak ini dapat dilihat dari dua sisi, dampak positif dan negatif. Dampak negatif terlihat pada segi ekologi dan perubahan struktur agraria, namun pada dampak positif dapat dilihat pada jumlah industri kerajinan kecil atau UKM terutama pada pertambangan marmer. Dampak aktivitas pertambangan dapat memicu banyak kemungkinan yang terjadi baik itu pada lingkungan maupun pada kehidupan manusia.

Aktivitas pertambangan juga ada di Kota Bima tepatnya di lingkungan Kadole Kelurahan Oi Fo'o, pertambangan di lingkungan Kadole lebih pada penggalian batu marmer. Wilayah Kadole yang terdiri dari gunung dan bebatuan memungkinkan banyaknya batu marmer di dalamnya. Aktivitas pertambangan di lingkungan Kadole sudah berlangsung dari tahun 2012 sampai sekarang, Penggalian batu marmer di lingkungan Kadole Kelurahan Oi Fo'o dilakukan oleh PT. Pasific Union Indonesia (PT. PUI).

Awal kehadiran pertambangan batu marmer di lingkungan Kadole Kelurahan Oi Fo'o ada reaksi penolakan

oleh masyarakat, akan tetapi karena adanya janji yang diberikan oleh Pemerintah bahwa dengan hadirnya tambang batu marmer akan memberikan peningkatan perekonomian bagi masyarakat Kadole yang pada akhirnya masyarakat menerima kehadiran tambang batu marmer sebagai sebuah perubahan yang baik. Selain dari masyarakat Kadole dijadikan sebagai pekerja dan karyawan di pertambangan tersebut. Disamping dijanjikan perubahan bagi kesejahteraan perekonomian masyarakat dan diangkat menjadi pekerja serta karyawan pertambangan, Walikota dan PT. PUI menjanjikan kehidupan yang layak kepada masyarakat Kadole yang direlokasi, mereka menjanjikan listrik, air bersih di setiap rumah, jalan diaspal, didirikan mesjid bahkan bagi yang bekeluarga diberikan lahan tempat tinggal dan seluruhnya disertifikasi gratis.

Akan tetapi realitas pada masyarakat Kadole Kelurahan Oi Fo'o sekarang ini kehidupannya kian terpuruk. Hal ini dikarenakan janji dari Pemerintah Kota Bima dan PT. PUI sampai sekarang ini belum terealisasi. Tempat relokasi yang baru tidak memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat Kadole, karena sumber mata pencaharian mereka tidak ada ditempat yang baru tersebut. Akhirnya masyarakat memilih untuk kembali menempati areal tempat tinggalnya yang dulu, dikarenakan sumber perekonomian mereka (sawah dan ladang) berada di areal tersebut.

Selain dari hal tersebut alasan masyarakat memilih untuk kembali dikarenakan sumber mata air yang ada di wilayah Kadole sangat menjanjikan untuk pengairan sawah dan ladang mereka, karena mata air yang tidak pernah kering sepanjang musim.

Berangkat dari hal tersebut, penulis terdorong untuk mengetahui realitas dari "Dampak Aktivitas Pertambangan Batu Marmer Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kadole Kelurahan Oi Fo'o Kota Bima".

TINJAUAN PUSTAKA

Faktor Penyebab Perubahan Sosial

Perubahan sosial bukanlah sebuah proses yang terjadi dengan sendirinya. Pada umumnya, ada beberapa faktor yang berkontribusi dalam memunculkan perubahan sosial. Faktor tersebut dapat digolongkan pada faktor *dari dalam* dan faktor *dari luar* masyarakat (Soekanto, 1999).

Faktor yang berasal dari dalam antara lain :

:

1. Bertambah dan berkurangnya penduduk. Pertambahan jumlah penduduk akan menyebabkan perubahan jumlah dan persebaran wilayah pemukiman.
2. Penemuan-penemuan baru. Penemuan baru yang berupa teknologi dapat mengubah cara individu berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan teknologi juga dapat mengurangi jumlah kebutuhan tenaga kerja di sektor industri karena tenaga manusia telah digantikan oleh mesin yang menyebabkan proses produksi semakin efektif dan efisien.
3. Pertentangan atau konflik. Proses perubahan sosial dapat terjadi sebagai akibat adanya konflik sosial dalam masyarakat. Konflik sosial dapat terjadi manakala ada perbedaan kepentingan atau terjadiketimpangan sosial.
4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi. Faktor ini berkaitan erat dengan faktor sebelumnya, konflik sosial. Terjadinya pemberontakan tentu saja akan melahirkan berbagai perubahan, pihak pemberontak akan memaksakan tuntutananya, lumpuhnya kegiatan ekonomi, pergantian kekuasaan, dan sebagainya.

Faktor yang berasal dari luar antara lain :

1. Terjadinya bencana alam atau kondisi lingkungan fisik. Kondisi

ini terkadang memaksa masyarakat suatu daerah untuk mengungsi meninggalkan tanah kelahirannya. Di sisi lain, pembangunan sarana fisik juga sangat memengaruhi perubahan aktivitas masyarakat.

2. Peperangan. Peristiwa peperangan, baik perang saudara maupun perang antarnegara dapat menyebabkan perubahan, karena pihak yang menang biasanya akan dapat memaksakan ideologi dan kebudayaannya kepada pihak yang kalah.
3. Adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Adanya interaksi antara dua kebudayaan yang berbeda akan menghasilkan perubahan.

Selain faktor tersebut, juga dapat dijelaskan mengenai faktor yang mendorong (mempercepat) dan faktor yang menghambat proses perubahan sosial. Adapun faktor yang mempercepat proses perubahan sosial adalah :

1. Kontak dengan budaya lain. Bertemunya budaya yang berbeda menyebabkan manusia saling berinteraksi dan mampu menghimpun berbagai penemuan yang telah dihasilkan, baik dari budaya asli maupun budaya asing, dan bahkan hasil perpaduannya.
2. Sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mengukur tingkat kemajuan sebuah masyarakat. Pendidikan telah membuka pikiran dan membiasakan berpola pikir ilmiah, rasional, dan objektif.
3. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Sebuah hasil karya dapat memotivasi seseorang untuk mengikuti jejak karya orang lain.
4. Adanya toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Penyimpangan sosial sejauh tidak melanggar

hukum atau merupakan tindak pidana, dapat merupakan cikal bakal terjadinya perubahan sosial budaya.

5. Sistem stratifikasi masyarakat yang terbuka.
Open stratification atau sistem stratifikasi yang terbuka memungkinkan adanya gerak sosial vertikal atau horizontal yang lebih luas kepada anggota masyarakat.
6. Penduduk yang heterogen. Masyarakat heterogen dengan latar belakang budaya, ras, dan ideologi yang berbeda akan mudah terjadi pertentangan yang dapat menimbulkan kegoncangan sosial.
7. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu. Rasa tidak puas dapat menjadi sebab terjadinya perubahan. Ketidakpuasan menimbulkan reaksi berupa perlawanan, pertentangan, dan berbagai gerakan revolusi untuk mengubahnya.
8. Adanya orientasi masa depan. Kondisi yang senantiasa berubah merangsang orang untuk mengikuti dan menyesuaikan dengan perubahan.
9. Adanya nilai bahwa manusia harus selalu berusaha untuk memperbaiki kehidupannya.

Faktor yang menghambat proses perubahan sosial :

1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain.
2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat.
3. Sikap masyarakat yang sangat tradisional.
4. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat atau vested interest.
5. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi

kebudayaan. Masuknya unsur-unsur kebudayaan dari luar dapat diyakini akan mengancam integrasi sebuah masyarakat.

6. Prasangka terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap yang tertutup.
7. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis.
8. Adat atau kebiasaan.
9. Adanya nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Sikap pasrah ini menyebabkan masyarakat enggan untuk melakukan perubahan (Soekanto, 1999).

Faktor pendorong perubahan sosial juga dapat dibedakan menjadi tiga aspek, yaitu : faktor sosial, psikologis dan budaya. Faktor dorongan sosial berkaitan dengan aspek organisasi sosial, seperti keluarga, kelompok-kelompok sosial tertentu, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya.

Beberapa unsur dalam masyarakat juga dapat menjadi penghambat proses perubahan sosial, baik dari aspek sosial, psikologis budaya ekonomi maupun politik. Faktor sosial diantaranya adalah stratifikasi sosial yang kaku, ketimpangan sosial yang terjadi, fragmentasi komunitas, kepentingan kelompok serta beberapa benturan kebudayaan.

Salim (2002) menjelaskan beberapa faktor yang dapat mendukung perubahan sosial. Faktor tersebut disebutnya sebagai "*five contemporary prime mover*" (Lima Faktor penggerak kontemporer). Kelima faktor tersebut adalah : Proses komunikasi dan perkembangan media (massa) dalam masyarakat. Media inilah yang berfungsi untuk mengkomunikasikan berbagai pesan perubahan sosial kepada masyarakat umum.

1. *Birokrasi*. Birokrasi dalam arti sempit dimaknai sebagai kekuasaan yang dikendalikan oleh sekelompok orang.
2. *Modal*. Faktor ini terkait erat dengan masalah perkembangan ekonomi suatu negara atau kelompok masyarakat.
3. *Teknologi*. Faktor ini jelas tidak diragukan lagi peran

sertanya.

Perkembangan teknologi dalam beberapa waktu terakhir ini terjadi dalam hitungan detik.

4. *Ideologi*. Ideologi pada dasarnya merupakan sistem ide atau gagasan yang dimiliki sekelompok orang yang dijadikan landasan bagi tindakannya.

Dampak Perubahan Sosial

Perubahan senantiasa mengandung dampak negatif maupun positif. Untuk itu, dalam merespon perubahan diperlukan kearifan dan pemahaman yang mendalam mengenai nilai, arah program, dan strategi yang sesuai dengan sifat dasar perubahan itu sendiri.

Teknologi pada hakikatnya diciptakan untuk memudahkan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Namun dalam kenyataannya, teknologi banyak disalahgunakan oleh manusia itu sendiri. Di lain pihak dengan semakin canggihnya teknologi, manusia menjadi tidak bebas dan menjadi tergantung dengan teknologi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa teknologi (inovasi) banyak membawa dampak bagi manusia sebagai pembuatnya. Dampak perubahan sering dihadapkan pada sistem nilai, norma, dan sejumlah gagasan yang didukung oleh media-media komunikasi yang dapat mengubah sistem sosial, politik, ekonomi, pendidikan maupun sistem budaya.

Sasaran Perubahan Sosial

Sasaran perubahan sosial dapat ditujukan kepada individu, kelompok masyarakat tertentu atau masyarakat secara keseluruhan yang akan dikenai perubahan. Sasaran perubahan sosial tidak tepat apabila diposisikan sebagai “objek” perubahan sosial, namun lebih tepat apabila kita menggunakan terminologi “subjek” yang akan diubah (subjek perubahan sosial). Sasaran perubahan dalam konteks ini dapat difokuskan pada tiga aspek, yaitu : *pertama*, karakteristik individu. Karakter individu dapat

digunakan sebagai sasaran perubahan sosial. Karakter ini dapat meliputi sikap, kebiasaan, perilaku, pola pikir atau pengetahuan, dan karakteristik demografis (umur, jenis kelamin, dan kesempatan hidup). *Kedua*, aspek budaya. Aspek ini berkenaan dengan norma-norma, nilai-nilai dan IPTEK. *Ketiga*, aspek struktural. Sasaran ini merupakan sasaran yang sangat luas cakupannya.

Perubahan sosial yang melibatkan aspek struktural sebagai sasaran perubahan, memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat mewujudkannya. Aspek ini dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. *Pertama*, kelompok sosial, yang meliputi perubahan yang berkaitan dengan masalah peranan kelompok, struktur komunikasi dalam kelompok, pengaruh suatu kelompok dan keberadaan klik-klik dalam suatu kelompok. *Kedua*, organisasi, seperti perubahan yang berkaitan dengan aspek struktur organisasi, hierarki dalam organisasi, wewenang, dan prokdivitasnya. *Ketiga*, institusi, seperti perubahan yang menyangkut bidang ekonomi, politik, agama, pendidikan dan lain-lain. *Keempat*, komunitas, seperti stratifikasi, demografi, dan kekuasaan. *Kelima*, masyarakat dunia (global), yaitu sehubungan dengan perubahan interaksi masyarakat internasional, seperti masalah modernisasi, globalisasi, serta alih teknologi dan pengetahuan (Harper, 1989).

1. Individu Sebagai Sasaran Perubahan Sosial

Apabila individu digunakan sebagai target perubahan, terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan, yaitu *pertama*, strategi psikoanalisis. Strategi ini berasumsi bahwa manusia pada hakikatnya mempunyai sifat seperti yang dilukiskan Freud, yaitu mempunyai *id*, *ego*, dan *superego*.

1. *Id* adalah sumber segala energi psikis, sehingga menjadi komponen utama kepribadian. *Id* didorong oleh prinsip kesenangan, yang berusaha untuk mendapatkan kepuasan

segera dari semua keinginan dan kebutuhan. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi secara langsung, hasilnya adalah individu akan mengalami kecemasan.

2. *Ego* adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani realitas.
3. *Super ego* adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar internalisasi moral dan cita-cita yang diperoleh dari keluarga atau masyarakat.

2. Kelompok Sebagai Target Perubahan

Kelompok dapat dijadikan target atau perantara perubahan. Asumsi dasar yang digunakan adalah bahwa perubahan suasana akan memengaruhi perubahan individu. Metode atau strategi perubahan yang dapat digunakan adalah :

- a. Metode yang mengubah komposisi kelompok, dengan cara mengubah keanggotaannya.
- b. Metode yang mengubah proses atau struktur kelompok yaitu dengan cara mengubah pola komunikasi di dalam kelompok itu, atau dengan cara meningkatkan peranan anggota kelompok dalam proses pembuatan keputusan (Lauer, 1982).

3. Struktur Sebagai Target Perubahan Sosial

Perubahan ditingkat struktur dapat meliputi perubahan dalam sistem pembagian kelas sosial, perubahan aspek vokasional anggota masyarakat atau perubahan norma dan nilai. Kata “struktur” menunjuk pada aktivitas membangun sesuatu dan menghasilkan produk akhir, yaitu membangun suatu tindakan. Konsep ini pada awalnya menunjuk pada bangunan fisik dan keseimbangan kekuatan fisik dari dalam yang memperlihatkan adanya solidaritas. Konsep struktur sosial, dari pemaknaan ini, kemudian diperluas pada hubungan bagian-bagian yang membentuk organisme

biologis dan berbagai macam organ, berbagai macam bantuan yang membentuk bumi, dan susunan atom sampai molekul (Scott, 2010).

Strategi Dasar Perubahan Sosial

Setiap upaya penciptaan perubahan sosial, memerlukan suatu strategi tertentu yang perlu diperhatikan. Terdapat beberapa strategi perubahan sosial yang dapat diterapkan, yaitu strategi fasilitatif, strategi reedukatif, strategi persuasif, strategi kekuasaan, serta strategi kekerasan versus nonkekerasan (Laur, 1982; Harper; 1989).

1. Strategi Fasilitatif

Strategi ini lebih sesuai diterapkan pada kelompok yang memiliki beberapa karakteristik, yaitu: menganggap bahwa suatu masalah yang dihadapinya membutuhkan suatu perubahan; terbuka untuk menerima bantuan dari pihak luar; serta mengharapkan terlibat dalam mengubah dirinya.

2. Strategi Reedukatif

Strategi ini digunakan apabila diketahui adanya hambatan-hambatan sosial budaya dalam upaya penerimaan suatu inovasi, terutama berkaitan dengan kelemahan pengetahuan atau pendidikan dan keterampilan dalam memanfaatkan suatu inovasi. Strategi reedukatif mengacu pada upaya-upaya penciptaan perubahan melalui program terstruktur dan pelatihan terhadap kelompok sasaran yang potensial untuk menerima perubahan, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media massa).

3. Strategi Persuasif

Strategi ini merupakan upaya melakukan perubahan masyarakat dengan cara membujuk masyarakat tersebut

untuk melakukan perubahan.

Strategi ini menekankan kemampuan pada agen perubahan dalam dua hal yaitu; menyusun dan menyeleksi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh suatu masyarakat dan berupaya untuk mencari jalan keluarnya; dan menggunakan bujukan melalui keterlibatan perasaan dan antisipasi terhadap faktor nonrasional yaitu mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal.

4. Strategi Kekuasaan

Strategi kekuasaan merupakan strategi yang digunakan untuk melakukan perubahan dengan cara paksaan, menggunakan kekerasan atau ancaman. Strategi ini sering kali mendapat pandangan negatif dan tidak mengesankan, karena kelompok sasaran berada pada bayang-bayang ketakutan atau kecemasan akan terjadinya perubahan.

5. Strategi Kekerasan versus Nonkekerasan

Strategi kekerasan ini misalnya adalah melalui aksi terorisme, peperangan, pembunuhan tanpa pandang bulu, atau menyalahgunakan seseorang untuk melakukan protes secara damai yang dapat menghasilkan kebalikan dari yang diharapkan (Lauer, 1982). Strategi nonkekerasan dapat dicapai melalui musyawarah, metode demokratik, kritik, persuasi (bujukan) serta pendidikan. Pemberdayaan Masyarakat dalam Proses Perubahan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Untuk itu, ide utama

mengenai pemberdayaan ini bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Konsep kekuasaan ini juga sering dikaitkan dengan kemampuan individu untuk membuat orang lain melakukan apa yang diinginkannya, terlepas dari minat dan keinginan mereka (Suharto, 2005).

Istilah

pemberdayaan (*empowerment*) memiliki pengertian menurut konteks budaya dan politik. Oleh karena itu, makna pemberdayaan tidak mudah untuk di terjemahkan kedalam semua bahasa. Pengertian pemberdayaan sebenarnya mencakup kekuatan sendiri, kemandirian, pilihan sendiri, kedaulatan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dianut seseorang atau masyarakat, kapasitas untuk memperjuangkan hak, kemerdekaan, pembuatan keputusan sendiri, menjadi bebas, kebangkitan, dan kapabilitas.

Lingkungan Dalam Kajian Ilmu Sosial

Sosiologi lingkungan Dunlap dan Catton dibangun dari beberapa konsep yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu sebagai berikut :

- a. Persoalan-persoalan lingkungan dan ketidakmampuan sosiologi konvensional untuk membicarakan persoalan-persoalan tersebut merupakan cabang dari pandangan dunia yang gagal menjawab dasar-dasar biofisik struktur sosial dan kehidupan sosial.
- b. Masyarakat modern tidak berkelanjutan sebab mereka hidup pada sumber daya yang sangat terbatas dan penggunaan di atas pelayanan ekosistem jauh lebih cepat disbanding kemampuan ekosistem

- memperbahui dirinya. Dalam tingkatan global proses ini diperparah dengan pertumbuhan populasi secara pesat.
- c. Masyarakat menuju tingkatan lebih besar atau lebih kurang berhadapan dengan kondisi yang rentan ekologis.
 - d. Ilmu lingkungan modern telah mendokumentasikan kepelikan persoalan lingkungan tersebut dan menimbulkan kebutuhan akan penyesuaian besar-besaran jika krisis lingkungan ingin dihindari.
 - e. Pengenalan dimensi-dimensi krisis lingkungan yang menyumbang pada “pergeseran paradigma” dalam masyarakat secara umum, seperti yang terjadi dalam sosiologi (penolakan pandangan dunia barat dominan dan penerimaan sebuah paradigam ekologi baru).
 - f. Perbaikan dan reformasi lingkungan akan dilahirkan lewat perluasan paradigma ekologi baru diantara publik, massa, dan akan dipercepat oleh pergeseran paradigma yang dapat dibandingkan antara ilmuwan sosial dan ilmuwan alam.

Sementara itu, sosiologi lingkungan Schnaiberg memberikan perhatian pada lima konsep kunci berikut.

1. Pekerjaan yang terus menerus, produksi yang menyebabkan degradasi lingkungan dan tambahan-tambahannya. Pekerjaan produksi diselenggarakan oleh kapitalisme dan Negara modern yang mempertunjukkan logika mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan akumulasi modal pribadi. Alam memproduksi dirinya karena proses ini mengasumsikan karakter “pekerjaan.”
2. Kecenderungan pertumbuhan karena sifat kompetitif kapitalisme, seperti korporasi dan pengusaha harus memperluas usahanya. Akan tetapi, di sana juga berlaku sebuah logika pertumbuhan komplementer dalam lingkungan Negara.
3. Mempertinggi akumulasi milik pribadi, Negara berusaha

membelanjakan tujuan pada subsidi atau mensosialisasikan pengeluaran produksi pribadi dan akumulasi lewat subsidi public pada penelitian dan pengembangan infrastruktur transportasi, militer, dan insentif.

4. Akumulasi yang dikembangkan cenderung pada intensifikasi modal, kemudian mengarahkannya kepada otomatisasi, pengangguran, dan secara potensial menuntut untuk penciptaan pekerjaan atau program Negara kesejahteraan (*welfare state*) untuk mereka yang tertinggal atau terpinggirkan oleh proses akumulasi modal.
5. Pertumbuhan modal yang intensif menciptakan dislokasi dan tuntutan politik. Tuntutan tersebut menggerakkan pengeluaran Negara dan pertumbuhan modal dan hal itu merupakan esensi sifat pekerjaan kapitalisme industrial modern.

Dominasi (Determinisme) Lingkungan Pada Kehidupan Manusia

Dalam tahapan hubungan manusia dengan lingkungan, ditunjukkan bahwa seluruh aspek budaya, perilaku bahkan “nasib” manusia dipengaruhi, ditentukan, dan tunduk pada lingkungan. Dalam kehidupan kelompok, misalnya, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa bentuk-bentuk persekutuan hidup muncul sebagai akibat dari interaksi iklim, geografis, dan ekonomi. Ketiga bagian dari lingkungan itu juga bersifat sangat menentukan corak temperamen manusia (Ibnu Khaldun dalam Madjid Fakhry, 2001: 126).

Sementara itu, Donald L. Hardisty yang mendukung pandangan dominasi lingkungan menyatakan lingkungan fisik memainkan peran dominan sebagai pembentuk kepribadian, moral, budaya, politik, dan agama. Pandangan ini muncul tidak terlepas dari asumsi dalam tubuh manusia ada tiga komponen dasar, yakni bumi, air, dan tanah yang merupakan unsur-unsur penting lingkungan.

Untuk semakin memperjelas ini bisa dilihat dalam tulisan Pramudya Sunu (2001) menyatakan bahwa terdapat dua jenis

bencana akibat rusaknya daya dukung lingkungan. *Pertama*, kerusakan karena faktor *internal*, yakni kerusakan yang berasal dari alam sendiri. Bagi masyarakat, kerusakan ini sukar dihindari sebab merupakan bagian dari proses alam. *Kedua*, kerusakan karena faktor *eksternal*, yaitu kerusakan lingkungan yang berasal dari perilaku manusia. Terutama beralasan demi meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup. Kerusakan daya dukung sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan, seperti: industrialisasi, penggunaan bahan bakar fosil dan limbah rumah tangga yang dibuang di sungai-sungai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Bima dengan alasan sebagai berikut Pertambangan batu marmer di Lingkungan Kadole Kelurahan Oi Fo'o Kota Bima, belum memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dampak Pertambangan Batu Marmer Di Kelurahan Oi FO'O Kota Bima Terhadap Perubahan Ekosistem Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan (tanah, udara dan air) yang tidak menguntungkan (merusak dan merugikan kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan) yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing (seperti sampah, limbah industri, minyak, logam berbahaya, dan sebagainya) sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi seperti semula (Susilo, 2003).

Dalam tahapan hubungan manusia dengan lingkungan, ditunjukkan bahwa seluruh aspek budaya, perilaku bahkan "nasib" manusia dipengaruhi, ditentukan, dan tunduk pada lingkungan. Dalam kehidupan kelompok, misalnya, Ibnu

Khaldun menyatakan bahwa bentuk- bentuk persekutuan hidup muncul sebagai akibat dari interaksi iklim, geografis, dan ekonomi. Ketiga bagian dari lingkungan itu juga bersifat sangat menentukan corak temperamen manusia (Ibnu Khaldun dalam Madjid Fakhry, 2001: 126).

Pramudya Sunu (2001) menyatakan bahwa terdapat dua jenis bencana akibat rusaknya daya dukung lingkungan. *Pertama*, kerusakan karena faktor internal, yakni kerusakan yang berasal dari alam sendiri. Bagi masyarakat, kerusakan ini sukar dihindari sebab merupakan bagian dari proses alam. *Kedua*, kerusakan karena faktor eksternal, yaitu kerusakan lingkungan yang berasal dari perilaku manusia. Terutama beralasan demi meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup. Kerusakan daya dukung sebagai akibat dari kegiatan- kegiatan, seperti: industrialisasi, penggunaan bahan bakar fosil dan limbah rumah tangga yang dibuang di sungai- sungai.

Setiap kegiatan penambangan baik itu penambangan batu bara, nikel dan marmer serta lainnya pasti menimbulkan dampak *positif* dan *negatif* bagi lingkungan sekitarnya. Dampak *positifnya* adalah meningkatnya devisa Negara dan pendapatan asli Daerah serta menampung tenaga kerja. Sedangkan dampak *negatif* dari kegiatan penambangan dapat dikelompokkan dalam bentuk kerusakan permukaan bumi.

Sebenarnya jika sumber daya alam dimanfaatkan kalau hanya mengikuti kebutuhan masing-masing secara individu, ia akan memiliki kemampuan meregenerasi dengan sendirinya. Hanya yang terjadi, penggunaan sumber daya alam tidak memerhatikan daya dukung lingkungan, akibatnya lingkungan rusak di mana-mana dan besar kemungkinan tidak terselamatkan. Persoalan ini logis terjadi. Jumlah populasi manusia yang meningkat, jelas akan diikuti meningkatnya konsumsi atas sumber daya alam (SDA). Agar batas daya dukung tidak terlampaui, maka diupayakan agar laju konsumsi sumber daya dan pencemaran menurun relative

terhadap kenaikan kualitas lingkungan hidup. Jadi, syarat kenaikan kualitas hidup harus diupayakan bersamaan dengan ditekannya konsumsi SDA dan pencemaran (Philip Kristanto, 2002: 43).

Dilihat dari sisi kerusakan Sumber Daya Alam yaitu tanah maka pada dasarnya dengan aktifitas pertambangan batu marmer yang berlokasi di wilayah pegunungan bisa dikatakan berdampak pada adanya sisa-sisa penggalian batu tersebut dengan menyisakan serpihan-serpihan batu-batu kecil hasil pemotongan batu-batu besar yang ada di wilayah pegunungan. Namun untuk wilayah bagian bawah yaitu wilayah pertanian bisa dilihat bahwa lahan pertanian warga disekitar pertambangan tidak sepenuhnya rusak dan masih sangat subur untuk ditanami berbagai tanaman sayuran. Karena aktifitas pertambangan berada di atas bukit dan hanya memanfaatkan batu-batu besar untuk dipotong dan dijadikan benda-benda bernilai seni tinggi.

Sementara itu, rusaknya tanah-tanah tidak terlepas dari adanya lahan-lahan krisis akibat pergundulan hutan yang tidak memerhatikan aturan (*illegal logging*) dan rusaknya kadar produktif tanah sebab dieksploitasi secara terus-menerus. Hutan yang menyangga sebagai sistem lingkungan hidup dunia telah mengalami kerusakan. Sebesar 42% dari hutan dunia telah rusak dengan tanpa bisa diperbaiki kembali.

Dapat disimpulkan bahwa dengan hadirnya pertambangan batu marmer yang ada di Kelurahan Oi FO'O ini ada yang berdampak positif dan berdampak negatif bagi lingkungan sekitar. Dampak positifnya bahwasannya lingkungan tempat aktifitas pertambangan berlangsung tidak serta merta berubah dan mempengaruhi ekosistem yang ada seperti tanah, air, dan kondisi dari tumbuh-tumbuhan sekitar pertambangan. Terbukti ketersediaan air masih sangat bagus dan cukup untuk mengairi sawah-sawah maupun ladang-ladang masyarakat. Begitu pun dengan tanah dan tumbuhan yang masih belum terganggu ekosistemnya.

Adapun dampak negatifnya adalah sisa-sisa dari aktifitas pertambangan seperti serpihan-serpihan batu-batu kecil atau yang disebut dengan ampas buangan (*tailing*) tidak di urus sebagaimana mestinya. Seharusnya ampas buangan tersebut diperhatikan atau diantisipasi dengan didaur ulang atau disimpan ditempat yang jauh dari pemukiman agar tidak menimbulkan masalah lingkungan seperti terjadinya longsor berupa jatuhnya batu-batu tersebut dibawah pemukiman warga, karena ampas buangan tersebut tepat berada di atas rumah-rumah warga sekitar.

Dampak Aktivitas Pertambangan Batu Marmer Pada Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Lingkungan Kadole Kelurahan Oi FO'O Kota Bima

Dampak Sosial dan Kemasyarakatan

Perubahan sosial dan perubahan kebudayaan hanya dapat dibedakan dengan membedakan secara tegas pengertian antara masyarakat dan kebudayaan. Dengan membedakan dua konsep tersebut, maka dengan sendirinya akan membedakan antara perubahan sosial dengan perubahan kebudayaan. Terdapat perbedaan yang mendasar antara perubahan sosial dengan perubahan budaya. Perubahan sosial meliputi bagian dari perubahan budaya. Perubahan sosial meliputi perubahan dalam perbedaan usia, tingkat kelahiran, dan penurunan rasa kekeluargaan antara anggota masyarakat sebagai akibat terjadinya arus urbanisasi dan modernisasi.

Perubahan kebudayaan jauh lebih luas dari perubahan sosial. Perubahan budaya menyangkut banyak aspek dalam kehidupan seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, aturan-aturan hidup berorganisasi, dan filsafat. Perubahan sosial dan perubahan budaya yang terjadi dalam masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan dan sebaliknya tidak mungkin ada kebudayaan tanpa masyarakat (Nanang Martono, 2012:12).

Konflik lahan kerap terjadi antara perusahaan dengan masyarakat lokal yang lahannya menjadi obyek pengurusan.

Kerap perusahaan menunjukkan kearogansiannya dengan menggusur lahan tanpa melewati persetujuan pemilik atau pengguna lahan. Atau tak jarang mereka memberikan ganti rugi yang tidak seimbang dengan hasil yang akan mereka dapatkan nantinya. Tidak hanya konflik lahan, permasalahan yang juga sering terjadi adalah diskriminasi. Akibat dari pergeseran ini membuat pola kehidupan mereka berubah menjadi lebih konsumtif. Bahkan kerusakan moral pun dapat terjadi akibat adanya pola hidup yang berubah.

Proses perubahan sosial dapat diketahui dari ciri-cirinya sebagai berikut : *pertama*, tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya karena setiap masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara lambat maupun cepat. *Kedua*, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti oleh perubahan pada lembaga-lembaga sosial yang lain. *Ketiga*, perubahan yang berlangsung sangat cepat, biasanya mengakibatkan disorganisasi karena dalam masyarakat ada proses penyesuaian diri/adaptasi. Disorganisasi yang diikuti oleh proses reorganisasi akan menghasilkan pemantapan kaidah-kaidah dan nilai yang baru. *Keempat*, suatu perubahan tidak dapat dibatasi pada aspek kebendaan atau spiritual saja, karena keduanya mempunyai kaitan timbal balik yang kuat. *Kelima*, secara tipologis, perubahan sosial dapat dikategorikan sebagai :

1. Proses sosial, yang menyangkut sirkulasi atau rotasi ganjaran fasilitas-fasilitas dan individu yang menempati posisi tertentu pada suatu struktur.
2. Segmentasi, yaitu keberadaan unit-unit secara struktural tidak berbeda secara kualitatif dari keberadaan masing-masing unit-unit tersebut.
1. Perubahan struktural, yaitu munculnya kompleksitas baru secara kualitatif mengenai peranan-peranan

dan organisasi.

2. Perubahan dalam struktur kelompok, yaitu perubahan dalam komposisi kelompok tingkat kesadaran kelompok dan hubungan-hubungan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Soekanto, 1999).

Dampak Ekonomi Masyarakat Dengan Hadirnya Pertambangan

Seiring penguatan pelaksanaan Otonomi Daerah (OTDA), pelaksanaan pembangunan tidak lagi dilakukan pada level nasional saja. Daerah akan menjadi agen pembangunan yang secara akumulatif diharapkan dapat menciptakan pembangunan dan kesejahteraan nasional. Semakin banyak Daerah yang membangun, tentu kebutuhan atas energi untuk menyokong pembangunan akan semakin meningkat. Bagi pembangunan Daerah, energi setidaknya memiliki dua peran, yaitu energi sebagai komoditas bahan baku dan energi sebagai komoditas bahan bakar.

Melalui pelaksanaan Otonomi Daerah, pengelolaan energi tidak lagi hanya dilakukan oleh Pemerintah pusat, melainkan juga melibatkan level Pemerintahan di bawahnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, kewenangan ketiganya dibagi ke dalam 31 urusan Pemerintahan, termasuk di dalamnya kewenangan mengelola energi dan sumber daya mineral.

Selain itu, beberapa Undang-undang sektor energi seperti UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba juga telah membagi kewenangan mengelola untuk tiga level Pemerintah, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan, Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan tersebut dirangkum menjadi kewenangan memberikan izin, kewenangan membina, dan kewenangan mengawasi kegiatan pertambangan. Praktiknya, upaya

Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya energi dan sumber daya mineral masih banyak diwarnai oleh berbagai kendala dan hambatan termasuk berbagai konflik yang terjadi akibat kepentingan-kepentingan politik kekuasaan yang dijalankan oleh Pemerintah itu sendiri dalam meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dari para investor/pemilik modal. Serta tidak adanya komunikasi yang baik yang dilakukan oleh Pemerintah setempat dalam mengelola dan mengambil kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat Daerah pada umumnya dan kepada masyarakat sekitar Daerah tambang khususnya.

Menurut (Amin, 2003)

pembangunan berkelanjutan dalam konteks usaha pertambangan adalah transformasi sumberdaya tidak terbarukan (*non renewable resources*) menjadi sumberdaya pembangunan terbarukan (*renewable resources*), peningkatan nilai tambah pertambangan harus berbasis sumberdaya setempat atau Nasional (*local resources based*), berbasis masyarakat (*community based*), dan berkelanjutan (*sustain nable*). Sedangkan menurut agenda 21 sektor pertambangan (2001), inti dari azas pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya mineral dapat memberikan kemanfaatan secara optimal bagi manusia pada masa kini tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang.

Industri ekstraktif tidak dihasilkan dari proses produksi dan bisa didapatkan tanpa terkait dengan proses ekonomi lainnya, sehingga yang kerap muncul adalah terbentuknya kawasan tersendiri yang terpisah/terisolasi (*enclave*) (Humpreys, 2007). Karena ekstraksi sumberdaya mineral memiliki keterikatan yang lemah bahkan nol dengan komoditi tertentu atau sektor ekonomi lainnya, menyebabkan sektor selain pertambangan melemah atau tidak berkembang di Daerah setempat sehingga dalam proses produksi harus mengambil

sumberdaya dari Daerah lain dengan cara mengimport tenaga kerja, mesin, peralatan, dan lain-lain. Sebagai konsekwensinya Daerah setempat mengalami efek pencucian /pengurasan (*backwash effect*) atau terjadinya kebocoran (*regional leakages*) yang sangat besar (Malanuang, 2002).

Pengelolaan industri di berbagai belahan dunia lebih banyak menuai kegagalan daripada keberhasilan. Bagi Negara-negara yang gagal mengambil manfaat dari berkah kekayaan yang mereka miliki disebut dengan istilah kutukan sumberdaya alam (*resource curse*). Menurut (Auti, 1993 dan Humpreys, 2007) Negara-negara yang berkelimpahan dengan sumberdaya alam seperti minyak dan gas, performa pembangunan ekonomi dan tata kelola Pemerintahannya (*good governance*) kerap lebih buruk dibandingkan Negara-negara yang sumberdaya alamnya lebih kecil.

Dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat di Kelurahan Oi FO'O Kota Bima setelah hadirnya pertambangan batu marmer ini cukup memberikan dampak perubahan ke arah yang lebih baik. Dimana kondisi tersebut diperkuat dari hasil wawancara peneliti dengan warga setempat bahwa dengan hadirnya pertambangan ini perubahan ekonomi masyarakat selangkah lebih maju, seperti mereka mendapatkan lahan secara gratis dari PT. Pasific Union Indonesia sebagai salah satu prasarat ganti rugi atas perjanjian masyarakat antara pihak PT, Pemerintah, dan masyarakat.

KESIMPULAN

Dampak yang ditimbulkan dari aktifitas pertambangan batu marmer di lingkungan Oi FO'O Kota Bima terhadap perubahan *ekosistem* lingkungan antara lain berupa adanya sisa-sisa batu yang terlihat di atas bukit atau disebut dengan ampas buangan (*tailing*). Dari aktifitas pertambangan tersebut tidak menimbulkan gangguan *ekosistem* lingkungan yang buruk seperti ketersediaan air untuk irigasi pertanian dan perkebunan masyarakat masih

terjaga dengan baik terlihat terawatnya mata air di bawah kaki gunung tempat aktifitas pertambangan berlangsung. Serta lahan-lahan pertanian warga masih produktif dan kondisi *ekosistem* lingkungan yang berada di area pertambangan seperti tumbuh-tumbuhan masih tumbuh dengan baik.

Dampak secara sosial dan budaya dari hadirnya pertambangan batu marmer di Lingkungan Kadole Kelurahan Oi FO'O Kota Bima antara lain : *Pertama*, masyarakat sangat mengapresiasi hadirnya pertambangan karena masyarakat mendapatkan kehidupan yang layak dari ganti rugi atas lahan tempat tinggal dan lahan pertanian dengan dipindahkan pada lahan pemekaran pemukiman yang baru. *Kedua*, secara strata sosial masyarakat Kelurahan Oi FO'O sudah mendapatkan banyak informasi dan *soft skill* maupun *hard skill* dari bekerja dengan perusahaan pertambangan. *Ketiga*, perubahan sosial dan budaya dengan hadirnya pertambangan ini terlihat dari gaya hidup masyarakat yang sekarang lebih konsumtif dan modern, yaitu dengan penggunaan alat-alat telekomunikasi dan hadirnya internet masuk desa.

Dampak secara ekonomi dengan hadirnya pertambangan batu marmer yang ada di Kelurahan Oi FO'O Kota Bima ini secara nyata telah memberikan kontribusi tambahan bagi nilai perekonomian masyarakat Oi FO'O. Dimana dengan hadirnya pertambangan ini secara tidak langsung maupun secara langsung masyarakat menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri yaitu dengan menjadi pegawai pertambangan. Berdasarkan perjanjian antara perusahaan dan masyarakat bahwa pegawai atau karyawan perusahaan harus diambil dari masyarakat sekitar area pertambangan. Yang pada akhirnya mampu menjamin

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. 2006. Kebijakan Publik. Jakarta: Suara Bebas
- Albrow, Martin. 1989. Birokrasi. Alih Bahasa M. Rusli Karim dan Totok Daryanto. Yogyakarta: PT.Tiara Wacana.
- Almond, Gabriel A, 1960. The Politics of Developing Areas. Princeton University Press.
- Baswir, Revrison. 2003. Dilema Kapitalisme Perkotaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar–IDEA.
- Blumer, Herbert. 1969. Symbolic Interactionism: Perspective and Method. Englewood Cliffs. New York: Prentice-Hall.
- Burhan, Bungin. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Deliarnov. 2006. Ekonomi Politik. Jakarta: Erlangga.
- Denhardt, R. B., and Grubbs J. W. 1999. Public Administration: An Action Orientation. Orlando: Harcourt Brace and Company.
- Dunn, William M. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Henry, Nicholas. 1988. Public Administration and Public Affair (Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Publik). Terjemahan Luciana Lontoh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hikam, AS. 2000. Civil Society. Jakarta: LP3ES.
- Martono, Nanang. 2012. Sosiologi Perubahan Sosial (Perspektif klasik, Modern, Postmodern, dan Poskolonial). Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Osborne, D. & T. Gaebler. 1993. Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector. Massachusetts: Addison Wesley Company.
- Susilo, Rachmad K. Dwi. 2012. Sosiologi Lingkungan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- Undang-Undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nomor 32 tahun 2009.
- UU No. 11 Tahun 1967 mengenai Ketentuan Pokok Pertambangan dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.